BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa tujuan negara adalah untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang berdasarkan Pancasila. Mengupayakan tujuan itu, maka salah satu hal yang perlu ditingkatkan adalah kualitas sumber daya manusia Indonesia khususnya dalam hal kesehatan. Perlu meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia melalui dilakukan upaya peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan. Upaya yang tergolong penting dalam mengusahakan peningkatan derajat kesehatan manusia adalah dengan mengusahakan ketersediaan narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat. Bersamaan dengan itu, negara juga harus mampu melakukan pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan narkotika.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disingkat UU Narkotika), narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam

golongan-golongan. Adapun daftar golongan-golongan narkotika menurut Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, yakni Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II dan Narkotika Golongan III.

Narkotika Golongan I merupakan narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Narkotika Golongan II adalah narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Narkotika Golongan III adalah narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika telah menetapkan golongan-golongan narkotika dan peruntukannya hanya bagi dunia kesehatan dan ilmu pengetahuan, tetap saja terjadi penyalahgunaan terhadap narkotika oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Penyalahgunaan narkotika yang dimaksud adalah pemakaian di luar pengawasan dan

pengendalian yang akibatnya sangat membahayakan kehidupan manusia, baik perorangan, masyarakat, dan negara (Soedjono Dirdjosisworo, 1977: 3). Perkembangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang melanda dunia internasional juga berimbas ke Indonesia. Penyalahgunaan dan peredaran narkoba tersebut menyasar ke berbagai lapisan masyarakat. Dalam hal peredaran ini, jika sebelumnya diketahui menyasar ke tempat-tempat hiburan malam, sekarang ini justru menyasar ke permukiman masyarakat. Bahkan celaknya dalam beberapa kasus, peredaran narkoba juga ditemukan di lingkungan-lingkungan pendidikan. Sehingga tidak mengherankan apabila penyalahgunaan kebanyakan berasal dari kaum muda.

Kondisi darurat narkoba yang sedang terjadi tentu saja membutuhkan upaya-upaya luar biasa dari negara, pemerintah dan segenap jajaran aparat penegak hukum untuk menanggulangi masalah narkoba. Secara konsep pidana narkoba merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) sehingga masuk ke dalam kelompok pidana khusus bersama kejahatan korupsi dan terorisme. Upaya yang paling penting dalam menanggulangi tindakan kejahatan narkoba adalah penyelidikan. Di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tidak dikemukakan definisi penyelidikan, tetapi terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP). Pasal 1 angka 5 mengatur: “Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu

peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan”.

Menurut M. Yahya Harahap (2012:101), penyelidikan merupakan tindakan tahap pertama permulaan penyidikan. Harus diingat, penyelidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi penyidikan. Penyelidikan merupakan bagian yang tak terpisah dari fungsi penyidikan. M. Yahya Harahap menjelaskan lebih lanjut bahwa kalau dipinjam kata-kata yang dipergunakan buku petunjuk Pedoman Pelaksanaan KUHAP, penyelidikan merupakan salah satu cara atau metode atau sub daripada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum.

Mengacu pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana(KUHAP), penyidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia. Kemudian diperjelas dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotikabahwa terdapat dua pihak utama yang berwenang dalam melakukan penyelidikan yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Badan Narkotika Nasional (BNN). Kedua aparat yang disebut, dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya harus selalu terkordinasi dengan baik. Sesuai pengaturan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana(KUHAP), penyidik berwenang:

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
2. Mencari keterangan dan barang bukti;
3. Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Selain itu atas perintah penyidik, penyidik dapat melakukan tindakan berupa:

1. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penahanan;
2. Pemeriksaan dan penyitaan surat;
3. Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
4. Membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.

Penyelidikan oleh penyidik khususnya kepolisian sukar untuk dinilai apalagi diukur pencapaiannya dalam upaya pemberantasan kasus penyalahgunaan narkotika. Dikatakan demikian karena akhir-akhir ini begitu marak ditemukan narkotika jenis baru yang belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ataupun dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. Temuan narkotika jenis baru bukanlah persoalan internal negara Indonesia saja karena data menunjukkan dunia internasional juga demikian. Data yang tercatat oleh *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) ada 739 jenis zat psikoaktif baru atau *New Psychoactive Substances* (NPS) yang

beredar di seluruh dunia, dan yang masuk dalam ketentuan hukum sebanyak 60 *New Psychoactive Substances* (NPS). Itu menandakan bahwa jika 679 jenis *New Psychoactive Substances* (NPS) beredar di Indonesia maka para pengedar maupun penyalahguna narkoba tidak dapat tersentuh oleh hukum (www.ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2018/bn362-2018.pdf, diakses pada 11 November 2018).

Penemuan narkotika jenis baru dalam perkembangannya tidak hanya terdapat di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Makasar dan lainnya tetapi juga di Yogyakarta yang *notabene* dikenal sebagai kota pendidikan. Pada Agustus 2018, narkoba jenis baru ditemukan oleh Polda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Temuan narkoba baru tersebut muncul setelah jajaran Polda DIY melakukan penangkapan terhadap empat remaja pemakai narkoba jenis baru bernama 'Good Shit' itu. Empat remaja tersebut adalah RA (16), Al (18), KS (18), dan TE (21).Direktorat Reserse Narkoba atau disingkat Diresnarkoba Polda DIY Kombes Andi Fairan mengungkapkan jika penangkapan itu dilakukan pada 24 Agustus di sebuah rumah kos di daerah Krapyak, Sewon, Bantul, Yogyakarta. Karena belum masuk dalam daftar lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Polda Daerah Istimewa Yogyakarta tak melakukan penahanan terhadap keempat pelaku. Keempat pelaku yang mengaku mendapatkan barang itu secara online dengan harga Rp 200.000 (dua ratus riburupiah) itu tetap dikenai wajib lapor ke Polda DIY (<https://www.brilio.net/news/polda-diy-temukan-narkoba-jenis->

barubernamagood-shit-ayo-berantas-150908g.html, diakses pada 30 Januari 2019).

Contoh kasus penemuan penyalahgunaan narkotika jenis baru sebagaimana yang telah ditemukan berdasarkan hasil penyelidikan Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (selanjutnya disingkat Polda DIY) tentu saja berimbas pada penyelidikan selanjutnya. Hal ini disebabkan karena narkotika jenis baru tersebut tidak atau belum diatur dalam peraturan perundang-undangan khususnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan pelaksanaannya. Secara prinsip pidana, segala macam kegiatan yang berkaitan dengan proses-proses pemidanaan termasuk penyelidikan senantiasa diikat oleh asas legalitas atau kepastian hukum. Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur: “suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada”. Atas dasar asas legalitas itu pula, Polda DIY tidak mempidanakan pelaku penyalahgunaan narkotika jenis baru seperti contoh kasus di atas.

Penelitian ini bermaksud mendalami bagaimana Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penyelidikan terhadap penyalahgunaan narkotika jenis baru, dengan pertimbangan kesesuaian dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Bagaimana di masa mendatang dalam penyelidikan terhadap penyalahgunaan narkotika jenis baru dengan pertimbangan bahwa

penyalahgunaan narkotika jenis baru tersebut tidak dapat dipidanakan karena tidak atau belum diatur dalam peraturan perundang-undangan. Apakah di masa mendatang Polda Daerah Istimewa Yogyakarta akan terus memberlakukan kebijakan wajib lapor bagi pengguna narkotika jenis baru. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis tertarik mengkaji tentang “Penyelidikan Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Jenis Baru”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut, dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah penyelidikan Polda DIY terhadap penyalahgunaan narkotika jenis baru sesuai ketentuan yang berlaku?
2. Hambatan apa yang dihadapi Polda DIY dalam penyelidikan terhadap penyalahgunaan narkotika jenis baru?
3. Bagaimanakah kebijakan Polda DIY mengatasi hambatan dalam penyelidikan terhadap penyalahgunaan narkotika jenis baru?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan tersebut, maka penelitian hukum ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui dan menganalisis penyelidikan Polda DIY terhadap penyalahgunaan narkotika jenis baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Mengetahui dan menganalisis hambatan-hambatan yang dihadapi Polda DIY dalam penyelidikan terhadap penyalahgunaan narkoba jenis baru.
3. Mengetahui dan menganalisis kebijakan Polda DIY untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam penyelidikan terhadap penyalahgunaan narkoba jenis baru.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diuraikan tersebut, maka penulisan hukum ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Secara teoretis penelitian hukum ini diharapkan dapat bermanfaat untuk pengembangan Ilmu Hukum, khususnya di bidang Hukum Pidana.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Polda DIY; sebagai bahan pertimbangan dalam mendesain penyelidikan terhadap penyalahgunaan narkoba jenis baru agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Bagi Penulis; penelitian hukum ini secara praktis diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah wawasan penulis terutama secara akademik. Harapan lainnya adalah penelitian hukum ini dapat dijadikan wadah pembelajaran bagi masyarakat atau siapa saja agar dapat membantu memberikan pemahaman dan sumbangan informasi dalam memperdalam bidang Hukum Pidana, khususnya mengenai tindak pidana narkoba.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini merupakan karya peneliti dan bukan merupakan plagiasi dari hasil karya orang lain dan tentu penulisan ini merupakan penelitian baru. Selanjutnya sebagai bahan perbandingan ada tiga tesis hasil peneliti lain yang memiliki kemiripan dengan penelitian ini yaitu :

1. Albertus Ismoko Tri Handoyo (NPM: 165202515) Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta
 - a. Judul: Pertimbangan Penyidik Di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Pemberian Assessment Terhadap Tersangka Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika.
 - b. Rumusan Masalah :
 - 1) Apakah yang menjadikan pertimbangan penyidik di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dalam pemberian *assessment* terhadap tersangka tindak pidana narkotika?
 - 2) Apakah kendala yang dihadapi oleh peenyidik di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dalam pemberian *assessment* terhadap tersangka tindak pidana narkotika?
 - 3) Bagaimanakah kebijakan *assessment* terkait status orang yang terlibat dalam tindak pidana narkotika itu sebaiknya dirumuskan?
 - c. Hasil Penelitian :

Pemberian *assessment* kepada korban penyalahgunaan narkoba harus memiliki dasar hukum yang jelas sehingga tidak menimbulkan bumerang bagi institusi yang mengeluarkan *assessment*, dan pertimbangan penyidik ada pada Pasal 54 dan Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, SEMA Nomor 04 Tahun 2010, dan Peraturan Bersama Menteri dan Kapolri. Kendala yang dihadapi oleh penyidik dalam pemberian *assessment*, selain kendala yang dihadapi penyidik adalah waktu dan anggaran. Pasal 75 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba menjelaskan kewenangan BNN dalam melakukan penyidikan, dan penyidik mendapat dukungan penuh keuangan dalam mengungkap perkara, termasuk dalam memberikan *assessment* ditegaskan dalam Peraturan Bersama BAB VI Pembiayaan Pasal 14 angka 4, biaya pelaksanaan *assessment* yang dilakukan oleh Tim *assessment* Terpadu dibebankan pada anggaran Badan Narkoba Nasional, dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkoba Nasional Bagian Ketiga Pasal 3 huruf c Penyusunan perencanaan, program dan anggaran BNN.

Kebijakan Kepala Kepolisian Republik Indonesia mengeluarkan Surat Telegram Nomor STR/701/VIII/2014 tanggal 24 Agustus 2014 tentang tempat yang dapat digunakan untuk pelaksanaan *assessment* yaitu tempat rehabilitasi korban tindak pidana narkoba, Surat Telegram

Rahasia Nomor 865/X/2015 tertanggal 26 Oktober 2015 untuk pelaku tindak pidana narkoba tidak dilakukan penahanan, dan adanya surat pernyataan atau permohonan dari keluarga tersangka bahwa tersangka akan menjalani rehabilitasi medis atau sosial untuk penyembuhan, dan peran keluarga sangat besar untuk membantu penyembuhan tersangka.

2. Aribandi (NPM : 10500110023) Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

a. Judul : Pelaksanaan Penyelidikan Dan Penyidikan Tindak Pidana Narkoba

b. Rumusan Masalah :

1) Bagaimanakah kewenangan penyidik dan penyidik di BNN Sulawesi Selatan?

2) Bagaimana proses penyelesaian kasus narkoba di BNN Sulawesi Selatan?

c. Hasil Penelitian :

Kewenangan penyidik BNN diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasl 7, adapun bunyi pasal tersebut yaitu dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba, BNN berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap prekursor narkoba. Menurut

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam hal melakukan pemberantasan narkotika, BNN diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap penyalahgunaan, peredaran narkotika, dan prekursor narkotika disertai dengan kewenangan penangkapan 3x24 jam dan dapat diperpanjang 3x24 jam ditambah penyadapan. Namun demikian selain adanya penyidik BNN, ada juga penyidik Polri, dan PPNS. Selain itu BNN memiliki kewenangan khusus yaitu mampu melakukan penyadapan 3x24 jam dengan berkordinasi dengan pihak penyedia jaringan seluler. Dalam proses penyelesaian kasus tindak pidana narkotika diperlukan alat bukti untuk memperkuat dugaan bahwa seseorang positif menggunakan narkotika. Pada kenyataannya pemenuhan alat bukti dalam tindak pidana narkotika juga sering mengalami banyak kendala. Permasalahan yang sering terjadi antara lain, penangkapan pelaku tindak pidana narkotikatersebut sering dilakukan dengan cara-cara khusus yaitu ketika dilakukan penangkapan maka beberapa alat buktinya tidak memenuhi persyaratan minimal sebagai alat bukti.

3. Made Dwi Kurniahartawan (NPM: 1290561024) Mahasiswa Magister Ilmu hukum Program Pasca Sarjana Universitas Udayana Denpasar.
 - b. Judul : Kewenangan Penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN) Terhadap Penedar Narkotika *New Psychoactive Substances*
 - c. Rumusan Masalah:

- 1) Apakah sah kewenangan penyidik Badan Narkotika Nasional melakukan penyidikan tindak pidana narkotika?
- 2) Apakah sah penyidikan yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional terhadap kasus narkotika Raffi Ahmad dikaji berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika?

d. Hasil Penelitian :

Bahwa kewenangan penyidik Badan Narkotika Nasional dalam tindak pidana narkotika berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 mengacu pada Pasal 149 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak sah karena Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sebagai undang-undang administrasi pidana yang memuat pelabelan narkotika dan tatacara pengadaan presekusor narkotika, sehingga tidak dapat mendelagasikan pembentukan Badan Narkotika Nasional, dan BNN hendaknya dibentuk melalui peraturan pelaksana seperti Peraturan Pemerintah.

Ketiga tesis tersebut berbeda dengan yang akan diteliti oleh penulis. Tesis dengan judul Penyelidikan Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Jenis Baru bukan merupakan duplikasi dari ketiga tesis tersebut. Tesis pertama memfokuskan pada pertimbangan penyidik di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dalam pemberian *assessment* terhadap tersangka

penyalahgunaan tindak pidana narkoba. Selain itu tesis yang kedua membahas tentang pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba. Tesis yang ketiga menitikberatkan pada kewenangan penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam tindak pidana narkoba adalah tidak sah karena BNN dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010.

F. Batasan Konsep

1. Penyelidikan

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Mengacu pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berwenang melakukan penyelidikan atau disebut penyidik adalah setiap pejabat polisi Negara Republik Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang berwenang melakukan penyelidikan adalah Kepolisian dan BNN. Kepolisian dan BNN sama-sama berwenang dalam penyelidikan maka sumber kewenangan keduanya sama-sama berasal dari Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Fokus penyelidikan dalam

penelitian ini adalah penyelidikan yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap penyalahgunaan narkotika jenis baru.

2. Penyalahgunaan

Di dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak diatur secara khusus terkait maksud istilah penyalahgunaan. Sudah tentu dalam konteks narkotika sudah dipahami secara umum bahwa penyalahgunaan merupakan tindakan yang menggunakan narkotika secara melawan hukum yaitu di luar kepentingan dunia medis dan ilmu pengetahuan. Pada istilah penyalahgunaan yang perlu dipahami adalah terdapat subyek atau pelaku yang disebut sebagai penyalahguna atau pengguna. Pengguna adalah orang yang menggunakan narkotika dengan cara melawan hukum atau tanpa hak untuk menggunakannya. Dalam penelitian ini, dalam term penyalahgunaan termasuk juga pengguna sehingga penyalahgunaan dalam penelitian ini tidak terpisah dari pengguna sebagai subyek atau pelaku penyalahgunaan.

3. Narkotika Jenis Baru

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan. Di dalam

perkembangannya, narkotika terus menghasilkan jenis-jenis yang baru yang tidak dapat dijangkau oleh peraturan perundang-undangan. Narkotika jenis baru yang dimaksud dalam penelitian ini adalah narkotika yang tidak atau belum masuk dalam kategori-kategori sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, yakni Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II dan Narkotika Golongan III, yang memenuhi unsur-unsur pengertian narkotika yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

G. Sistematika Isi

Bab I Pendahuluan

Dalam Bab I yaitu pendahuluan dikemukakan gambaran umum mengenai pokok masalah yang terkandung dalam penulisan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, dan sistematika isi.

Bab II Tinjauan Pustaka

Bab II menguraikan penjelasan mengenai tinjauan pustaka dan landasan teori. Tinjauan pustaka berisi dua pembahasan. Pertama, penyelidikan terhadap penyalahgunaan narkotika yang dibagi menjadi dua pembahasan penyelidikan dan pengertian penyalahgunaan. Kedua, kajian tentang narkotika jenis baru. Serta landasan teori yang digunakan adalah teori kewenangan.

Bab III Metode Penelitian

Bab III menguraikan tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis data, metode pengumpulan data, analisis data, dan proses berpikir.

Bab IV Penelitian Dan Pembahasan

Bab IV menjelaskan mengenai hasil penelitian dan pembahasan mengenai tiga pokok permasalahan. Pertama, apakah penyelidikan oleh Polda DIY terhadap penyalahgunaan narkoba jenis baru sesuai ketentuan yang berlaku. Kedua, hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi Polda DIY dalam penyelidikan terhadap penyalahgunaan narkoba jenis baru. Ketiga, bagaimanakah kebijakan Polda DIY mengatasi hambatan-hambatan dalam penyelidikan terhadap penyalahgunaan narkoba jenis baru.

Bab V Penutup

Bab V menguraikan kesimpulan dari permasalahan yang diteliti dan saran yang diajukan sebagai tindak lanjut dari hasil penelitian yang diperoleh.